

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Saat ini perkembangan tersebut telah memasuki era Revolusi Industri 5.0, di mana hampir seluruh aktivitas bisnis dan perbankan telah mengadopsi teknologi digital serta internet, termasuk pemanfaatan *Internet of Things* (IoT). Perkembangan teknologi yang pesat ini melahirkan suatu peradaban baru yang dikenal sebagai *cashless society*, yaitu masyarakat yang tidak lagi mengandalkan uang tunai dalam melakukan transaksi, melainkan menggunakan media pembayaran digital seperti kartu kredit, kartu debit, maupun *cash card*. Dalam lima tahun terakhir jumlah uang elektronik yang beredar terus mengalami pertumbuhan yang positif, hal ini mencerminkan bahwa digitalisasi di sektor keuangan dan perbankan terus berkembang dan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional (Manik, 2019).

Memasuki awal tahun 2020, pandemi *Covid-19* mulai melanda Indonesia, yang secara langsung menyebabkan ketidakstabilan di berbagai sektor, termasuk kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat dipaksa untuk menyesuaikan pola hidup dan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal bertransaksi. Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah turut mengurangi mobilitas penduduk, yang pada akhirnya mendorong percepatan penggunaan sistem pembayaran digital. Transaksi konvensional mulai tergantikan oleh metode digital yang lebih praktis, aman, dan

efisien. Seiring waktu, masyarakat Indonesia mulai terbiasa dan mampu beradaptasi dengan sistem pembayaran non tunai, hingga saat ini penggunaan uang elektronik telah menjadi bagian dari keseharian dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Salah satu faktor yang turut mendorong minat masyarakat terhadap transaksi *cashless* adalah berbagai promosi yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Diskon, *cashback*, dan *insentif* lainnya menjadi daya tarik tersendiri, yang tidak hanya meningkatkan penggunaan uang elektronik tetapi juga mendorong peningkatan perilaku konsumtif masyarakat. Dalam konteks makroekonomi, tingginya konsumsi masyarakat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudahan dalam bertransaksi mempercepat perputaran uang di pasar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Wijaya, 2021).

Namun di balik efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan, penggunaan uang elektronik juga membawa sejumlah dampak negatif. Semakin tingginya minat masyarakat dalam bertransaksi secara digital menjadikan sistem ini semakin menarik bagi pelaku kejahatan *cyber*. Ancaman seperti pencurian data pribadi dan pengambilalihan saldo pengguna menjadi risiko yang harus diwaspadai. Selain aspek keamanan, penggunaan uang elektronik juga dapat memberikan dampak terhadap perekonomian, salah satunya berpotensi mendorong inflasi, meskipun dampaknya tidak terjadi secara langsung (Wijaya, 2021).

Tabel 1.1
Transaksi Uang Elektronik, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi
di Indonesia Tahun 2019-2024

Tahun	Transaksi Uang Elektronik (Miliar Rupiah) (X₁)	Inflasi (Persen) (X₂)	Pertumbuhan Ekonomi (Miliar Rupiah) (Y)
2019	145.165	2,72	10.949.155
2020	204.909	1,68	10.722.999
2021	305.436	1,87	11.120.060
2022	407.534	5,51	11.710.223
2023	457.729	2,61	12.301.475
2024	597.199	1,57	12.920.282

Sumber : Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa perkembangan uang elektronik di Indonesia menunjukkan tren peningkatan volume transaksi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 nilai transaksi uang elektronik tercatat sebesar Rp 145.165 miliar, yang mencerminkan peningkatan adopsi sistem pembayaran digital, seiring dengan berkembangnya ekonomi digital serta dukungan kebijakan dari otoritas moneter. Pada tahun 2020, nilai transaksi uang elektronik meningkat secara signifikan akibat pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia. Kondisi ini turut mendorong percepatan penggunaan pembayaran digital, yang didukung oleh kemunculan berbagai aplikasi dan *platform* seperti *GoPay*, *OVO*, dan *DANA* yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi. Selain itu, Gerakan Nasional Non Tunai yang telah dicanangkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2014 juga berperan penting dalam mendorong peralihan dari transaksi tunai ke non tunai, sehingga meningkatkan kesadaran serta penggunaan uang elektronik di kalangan masyarakat (Carolina, 2023).

Pada tahun 2021 nilai transaksi uang elektronik di Indonesia mencapai Rp 305.436 miliar yang mencerminkan peningkatan penggunaan sistem pembayaran digital akibat pembatasan sosial dan digitalisasi sektor perdagangan, jasa, dan transportasi. Peningkatan ini turut didukung oleh perluasan jaringan *merchant* dan integrasi layanan digital. Pada 2022 nilai transaksi melonjak menjadi Rp 407.534 miliar, menandakan bahwa penggunaan uang elektronik telah menjadi kebiasaan baru masyarakat serta mencerminkan adaptasi terhadap digitalisasi ekonomi dan meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pembayaran elektronik.

Pada tahun 2023 nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp 457.729 miliar, yang menandakan berlanjutnya tren positif dalam integrasi uang elektronik ke dalam sistem keuangan nasional. Pertumbuhan ini didorong oleh perluasan akses ke layanan keuangan digital, peningkatan kualitas internet, serta kerja sama pemerintah dan sektor swasta dalam menjangkau masyarakat termasuk di wilayah terpencil. Hingga tahun 2024 uang elektronik telah diterima secara luas sebagai alat pembayaran yang sah dan efisien, tercermin dari peningkatan nilai transaksi menjadi Rp 597.199 miliar.

Dalam teori permintaan dan penawaran *agregat*, peningkatan transaksi uang elektronik dapat mendorong konsumsi dan investasi, sehingga meningkatkan permintaan *agregat*. Jika tidak diimbangi oleh penawaran *agregat*, hal ini dapat menimbulkan tekanan inflasi. Dengan demikian, meskipun uang elektronik mempermudah transaksi, inflasi tetap bergantung pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian.

Berdasarkan data terlihat bahwa pada tahun 2019 inflasi tercatat sebesar 2,72 % yang mencerminkan stabilitas harga yang cukup baik sebelum pandemi. Tingkat inflasi ini berada dalam target sasaran Bank Indonesia, menunjukkan bahwa pasokan barang dan jasa relatif seimbang dengan permintaan. Stabilitas harga terutama didukung oleh pasokan pangan yang memadai serta kebijakan pengendalian harga energi dan transportasi. Inflasi yang rendah ini juga menjadi sinyal bahwa tidak terdapat tekanan besar baik dari sisi permintaan maupun biaya produksi selama tahun tersebut. Namun pada tahun 2020 tingkat inflasi di Indonesia mencapai titik terendah dalam sejarah, yaitu sebesar 1,68 %. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia dan menyebabkan pelemahan aktivitas ekonomi secara menyeluruh.

Pada tahun 2021 inflasi mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,87 % meskipun angka tersebut masih tergolong rendah dan mencerminkan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi dan meningkatnya harga barang kebutuhan pokok, inflasi Indonesia mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 mencapai 5,51 %. Kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain gangguan rantai pasokan global, peningkatan harga energi, serta ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung sebagai dampak lanjutan dari pandemi.

Setelah tahun 2022, Indonesia mulai memasuki fase pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19*. Pada periode ini, inflasi secara bertahap menunjukkan tren penurunan. Angka inflasi menurun pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 1,57 % pada tahun 2024. Penurunan ini terjadi seiring dengan membaiknya kondisi

ekonomi secara umum, penerapan kebijakan moneter yang lebih ketat oleh otoritas terkait, serta pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh pemerintah. Program ini dirancang untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui berbagai stimulus fiskal dan dukungan terhadap sektor-sektor yang terdampak pandemi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi secara agregat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji isu tersebut dengan judul **“Pengaruh Transaksi Uang Elektronik dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Transaksi Uang Elektronik (X_1) dan Inflasi (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Indonesia baik secara parsial maupun simultan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Transaksi Uang Elektronik (X_1) dan Inflasi (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Indonesia baik secara parsial maupun simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu ekonomi dan menambah kajian ilmu ekonomi khususnya dibidang ilmu ekonomi moneter.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pemerintah dalam mengambil keputusan guna menentukan kebijakan moneter. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.